

Belanja Modal Memoderasi Dana Perimbangan dan Ukuran Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Keisya Anindya Syahda^{1*}, Fajar Syaiful Akbar²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

*E-mail: keisyaanindyasyahda@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 20-08-2026

Revision: 30-09-2026

Published: 05-10-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v4i2.763

ABSTRAK

Kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik dapat mendukung peningkatan kemampuan keuangan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadikan identifikasi terhadap berbagai faktor yang berkaitan dengan kinerja keuangan semakin penting dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dana perimbangan dan ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca 30 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2022-2024, dengan total 90 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan ukuran daerah berpengaruh positif signifikan. Belanja modal tidak memoderasi pengaruh dana perimbangan, tetapi memperkuat pengaruh positif ukuran daerah. Hasil ini menekankan pentingnya penguatan pendapatan daerah serta efektivitas belanja modal dan pengelolaan sumber daya.

Kata Kunci: Dana Perimbangan, Ukuran Daerah, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Strong local government financial performance can bolster local financial capacity while simultaneously reducing reliance on central government transfers. Consequently, identifying the various factors associated with financial performance has become increasingly important in efforts to enhance the effectiveness of Regional Budget (APBD) management. This study examines the effect of intergovernmental revenue and local government size on local government financial performance, with capital expenditure as a moderating variable. Using a quantitative approach, this study analyses secondary data from Budget Realisation Reports and Balance Sheets of 30 regency and municipal governments in Central Java during 2022-2024, resulting in 90 observations. Data were analysed using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The results show that intergovernmental revenue has a significant negative effect on financial performance, while local government size has a significant positive effect. Capital expenditure

Acknowledgment

does not moderate the effect of intergovernmental revenue but strengthens the positive effect of local government size. These findings highlight the importance of strengthening local revenue and improving the effectiveness of capital expenditure and resource management.

Key word: *Intergovernmental Revenue, Local Government Size, Capital Expenditure, Local Government Financial Performance*

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu aspek penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan publik serta pelaksanaan otonomi daerah. Kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif dan optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan (Ambya, 2023). Pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan keselarasan. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik dapat mendukung peningkatan kemampuan keuangan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadikan identifikasi terhadap berbagai faktor yang berkaitan dengan kinerja keuangan semakin penting dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur melalui lima rasio, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan rasio kemandirian sebagai indikator kinerja keuangan pemerintah daerah karena mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui sumber pendapatan yang dimiliki. Pemilihan indikator tersebut sesuai dengan kondisi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang masih relatif rendah. Berdasarkan Tabel 1, tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2024 masih didominasi kategori rendah.

Tabel 1. Rasio Kemandirian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024

Persentase	Tingkat	Jumlah Daerah
0% - 25%	Rendah Sekali	29
25% - 50%	Rendah	5
50% - 75%	Sedang	1
75% - 100%	Tinggi	0

Sumber: Diolah peneliti.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan melalui sumber pendapatan sendiri masih terbatas. Ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih menjadi bagian penting dalam pembiayaan kegiatan operasional dan pembangunan daerah (Ambya, 2023). Kondisi tersebut menarik untuk dikaji karena pada tingkat provinsi, Jawa Tengah justru menunjukkan capaian pengelolaan APBD yang baik dengan meraih tiga penghargaan dalam APBD Award 2024, yaitu kategori Pendapatan Daerah Tertinggi, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tertinggi, dan Realisasi Belanja Daerah Tertinggi (Meidyana, 2024). Perbedaan antara capaian pengelolaan APBD pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan kondisi kemandirian keuangan pada sebagian besar pemerintah kabupaten/kota menunjukkan adanya kondisi yang kontradiktif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa capaian keuangan pada tingkat provinsi belum tentu mencerminkan kondisi keuangan pada masing-masing kabupaten/kota, sehingga faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dikaji lebih lanjut.

Dana perimbangan dan ukuran daerah merupakan dua faktor yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan merupakan salah satu sumber pendanaan pemerintah daerah yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antardaerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penerimaan dana perimbangan dapat membantu daerah memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi proporsi yang tinggi dapat meningkatkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan mengurangi dorongan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (Mardiasmo, 2018).

Dalam perspektif teori keagenan, pemerintah daerah berperan sebagai agen yang diberi mandat untuk mengelola sumber daya publik, sedangkan masyarakat dan pemerintah pusat berperan sebagai prinsipal yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Perbedaan kepentingan dan asimetri informasi dalam hubungan tersebut dapat menimbulkan kebutuhan terhadap pengawasan dan akuntabilitas. Dana perimbangan yang tinggi dapat berkaitan dengan risiko ketergantungan dan *moral hazard*, sedangkan ukuran daerah yang lebih besar meningkatkan sumber daya yang perlu dikelola dan diawasi. Belanja modal menjadi salah satu bentuk pengalokasian sumber daya publik yang dapat menentukan efektivitas pemanfaatan sumber daya tersebut.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Riani & Hrp (2022) menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan Putri & Ratnawati (2023) menemukan pengaruh negatif. Pada ukuran daerah, Rahmadi *et al.* (2025) menemukan pengaruh positif, sementara Amalia *et al.* (2024) menemukan pengaruh negatif. Penelitian mengenai belanja modal sebagai variabel

moderasi juga menunjukkan hasil yang berbeda. Yudiastuti *et al.* (2025) menemukan bahwa belanja modal mampu memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan, sedangkan Hajar *et al.* (2024) menemukan bahwa belanja modal tidak mampu memoderasi hubungan tersebut.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah masih belum konsisten. Selain itu, peran belanja modal dalam memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan juga masih menunjukkan hasil yang berbeda. Pengujian belanja modal sebagai variabel moderasi pada hubungan ukuran daerah dan kinerja keuangan masih relatif terbatas. Penelitian yang menguji dana perimbangan dan ukuran daerah secara bersama-sama dengan belanja modal sebagai variabel moderasi juga masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan dan ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah serta menguji peran belanja modal dalam memoderasi hubungan tersebut. Penelitian ini berfokus pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2022-2024 dengan menempatkan dana perimbangan dan ukuran daerah sebagai variabel independen serta belanja modal sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui website resmi masing-masing daerah. Data yang digunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca selama periode 2022-2024. Sampel ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 30 pemerintah daerah dengan 90 data observasi.

Tabel 2. Kriteria Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah	35
2.	Pemerintah Daerah yang Mempublikasikan LRA dan Neraca berturut-turut untuk tahun 2022-2024	30
	Jumlah sampel yang memenuhi kriteria	30
	Total observasi (30 daerah × 3 tahun)	90

Sumber: Data Sekunder yang diolah peneliti (2026)

Variabel penelitian terdiri dari Dana Perimbangan (X_1), Ukuran Daerah (X_2), Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y), dan Belanja Modal (Z) sebagai variabel moderasi. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS melalui analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan *Moderated Regression Analysis* (Ghozali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran karakteristik data penelitian berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dana Perimbangan	90	5.26E+11	2.32E+12	1.4112E+12	4.17947E+11
Ukuran Daerah	90	28.54	31.64	29.3186	.57430
Belanja Modal	90	.05	.23	.1256	.03828
Kinerja Keuangan	90	.11	.53	.2144	.08341
Valid N (listwise)	90				

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel 3, hasil analisis statistik deskriptif sebagai berikut:

- Dana perimbangan memiliki nilai minimum sebesar Rp526.000.000.000 dan maksimum sebesar Rp2.320.000.000.000, dengan nilai rata-rata sebesar Rp1.411.200.000.000 dan standar deviasi sebesar Rp417.947.000.000. Hal tersebut menunjukkan adanya variasi penerimaan dana perimbangan antar pemerintah daerah selama periode pengamatan.
- Ukuran daerah yang diukur menggunakan logaritma natural total aset memiliki nilai minimum sebesar 28,54 dan maksimum sebesar 31,64, dengan nilai rata-rata sebesar 29,3186 dan standar deviasi sebesar 0,57430. Nilai standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa ukuran daerah dalam sampel memiliki variasi yang relatif terbatas.
- Belanja modal memiliki nilai minimum sebesar 0,05 dan maksimum sebesar 0,23, dengan nilai rata-rata sebesar 0,1256 atau 12,56% dan standar deviasi sebesar 0,03828. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pemerintah daerah mengalokasikan sekitar 12,56% dari total belanja daerah untuk belanja modal, dengan proporsi yang berbeda antar pemerintah daerah.
- Kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan rasio kemandirian memiliki nilai minimum sebesar 0,11 dan maksimum sebesar 0,53, dengan nilai rata-rata sebesar 0,2144 atau 21,44% dan standar deviasi sebesar 0,08341. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam sampel masih relatif rendah, sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah melalui sumber pendapatan sendiri masih terbatas.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi data variabel independen dan dependen mengikuti distribusi normal. Tabel berikut menyajikan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* pada

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	90
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	.063

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,063. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga residual pada model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan linear antarvariabel independen dalam model regresi. Tabel berikut menyajikan hasil uji multikolinearitas pada masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
1(Constant)		
X1_C	.787	1.271
X2_C	.513	1.948
Z_C	.855	1.169
Int_1	.621	1.610
Int_2	.443	2.260

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada Tabel 5, seluruh variabel dalam model regresi menunjukkan nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF yang masih berada di bawah batas yang ditentukan, yaitu 10. Variabel Dana Perimbangan yang telah melalui proses *mean centering* (X1_C) memiliki nilai VIF sebesar 1,271, Ukuran Daerah (X2_C) sebesar 1,948, dan Belanja Modal (Z_C) sebesar 1,169. Sementara itu, variabel interaksi antara Dana Perimbangan dan Belanja Modal (Int_1) serta Ukuran Daerah dan Belanja Modal (Int_2) menunjukkan nilai VIF masing-masing sebesar 1,610 dan 2,260. Seluruh nilai tersebut masih berada di bawah batas 10.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan residual dalam model regresi pada periode berjalan (*t*) dengan periode sebelumnya (*t-1*). Hasil uji autokorelasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	.056

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 6, hasil uji autokorelasi menggunakan *Runs Test* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,056. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi memiliki varians yang berbeda antarobservasi. Hasil uji Glejser disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
1(Constant)	.000
X1_C	.841
X2_C	.611
Z_C	.795
Int_1	.083
Int_2	.193

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 7, uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser* menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam model memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Variabel Dana Perimbangan (X1_C) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,841, Ukuran Daerah (X2_C) sebesar 0,611, dan Belanja Modal (Z_C) sebesar 0,795. Sementara itu, variabel interaksi antara Dana Perimbangan dan Belanja Modal (Int_1) serta Ukuran Daerah dan Belanja Modal (Int_2) memiliki nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,083 dan 0,193. Seluruh nilai tersebut berada di atas 0,05, sehingga model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menguji hubungan antara dana perimbangan, dan ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Model	B	Std. Error	Beta
1(Constant)	.214	.006	
X1_C	-1.169E-13	.000	-.586
X2_C	.110	.011	.758

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Tabel 8, diperoleh nilai konstanta sebesar 0,214. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketika dana perimbangan dan ukuran daerah berada pada nilai rata-ratanya setelah dilakukan *mean centering*, kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai sebesar 0,214. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan yang telah dilakukan *mean centering* (X1_C) memiliki koefisien regresi negatif, yang menunjukkan bahwa peningkatan dana

perimbangan cenderung diikuti oleh penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, variabel ukuran daerah yang telah dilakukan *mean centering* (X2_C) memiliki koefisien regresi sebesar 0,110, yang menunjukkan bahwa peningkatan ukuran daerah cenderung diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah:

$$Y = 0,214 - 1,169 \times 10^{-13}X_1 + 0,110X_2 + e$$

Moderated Regression Analysis (MRA)

Analisis MRA digunakan untuk menguji peran belanja modal dalam memoderasi pengaruh dana perimbangan dan ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis MRA disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Moderated Regression Analysis (MRA)

Model	B	Std. Error	Beta
1(Constant)	.206	.005	
X1_C	-9.839E-14	.000	-.493
X2_C	.062	.012	.429
Z_C	.239	.136	.110
Int_1	-1.072E-14	.000	-.002
Int_2	1.217	.223	.475

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Tabel 9, diperoleh nilai konstanta sebesar 0,206. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai kinerja keuangan pemerintah daerah ketika variabel dana perimbangan, ukuran daerah, dan belanja modal berada pada nilai rata-ratanya. Dana perimbangan yang telah dilakukan *mean centering* (X1_C) memiliki koefisien regresi negatif dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran daerah (X2_C) memiliki koefisien regresi sebesar 0,062 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja Modal (Z_C) memiliki koefisien regresi sebesar 0,239 dengan nilai signifikansi sebesar $0,083 > 0,05$, sehingga belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, interaksi antara dana perimbangan dan belanja modal (Int_1) memiliki koefisien negatif dengan nilai signifikansi sebesar $0,979 > 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa interaksi dana perimbangan dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, belanja modal tidak mampu memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sementara itu, interaksi antara ukuran daerah dan belanja modal (Int_2) memiliki koefisien regresi sebesar 1,217 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Koefisien interaksi yang bernilai positif menunjukkan bahwa belanja modal memperkuat pengaruh positif ukuran daerah terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah. Persamaan MRA yang diperoleh adalah:

$$Y = 0,206 - 9,839 \times 10^{-14}X_1C + 0,062X_2C + 0,239ZC - 1,072 \times 10^{-14}X_1CZC + 1,217X_2CZC + e$$

Uji Hipotesis

Uji t

Uji *t* dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji signifikansi parsial disajikan pada tabel berikut:

Tabel 10. Hasil Uji t

Model	B	t	Sig.	Keputusan
1X1_C	-1.169E-13	-7.399	.000	Ditolak
X2_C	.110	9.575	.000	Diterima
Int_1	-1.072E-14	-.026	.979	Ditolak
Int_2	1.217	5.471	.000	Diterima

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 10, temuan untuk masing-masing hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hipotesis 1: Berdasarkan hasil uji t, variabel dana perimbangan yang telah melalui proses *mean centering* (X1_C) memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi yang bernilai negatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Arah pengaruh tersebut tidak sesuai dengan arah hipotesis yang diajukan. Dengan demikian, H1 ditolak.
- Hipotesis 2: Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel ukuran daerah (X2_C) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan koefisien regresi positif sebesar 0,110. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, H2 diterima.
- Hipotesis 3: Berdasarkan hasil pengujian, variabel interaksi dana perimbangan dan belanja modal (Int_1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,979 > 0,05$ dengan koefisien regresi yang bernilai negatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa interaksi antara dana perimbangan dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, belanja modal tidak terbukti memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga H3 ditolak.
- Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel interaksi Ukuran Daerah dan Belanja modal (Int_2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan koefisien regresi positif sebesar 1,217. Hasil tersebut menunjukkan bahwa interaksi ukuran daerah dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Koefisien interaksi yang positif menunjukkan bahwa belanja modal memperkuat pengaruh positif ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, H4 diterima.

Uji F

Uji *F* dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji *F* disajikan pada tabel berikut:

Tabel 11. Hasil Uji F

Model	F	Sig.
1 Regression	43.065	.000 ^b
Residual		
Total		

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 11, diperoleh nilai *F* sebesar 43,065 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dana perimbangan, ukuran daerah, belanja modal, serta interaksi dana perimbangan dengan belanja modal dan interaksi ukuran daerah dengan belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa baik model regresi dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Hasil analisis koefisien determinasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.848 ^a	.719	.703

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 12, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,703. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan, ukuran daerah, belanja modal, serta interaksi antara dana perimbangan dengan belanja modal dan ukuran daerah dengan belanja modal mampu menjelaskan variasi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 70,3%. sementara itu, sebesar 29,7% variasi kinerja keuangan pemerintah daerah dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dengan koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa peningkatan dana perimbangan cenderung diikuti oleh penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, arah pengaruh yang ditemukan tidak sesuai dengan arah hipotesis yang diajukan, sehingga H1 ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri & Ratnawati (2023) yang menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa semakin besar penerimaan dana perimbangan, semakin besar pula potensi ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut dapat tercermin dalam tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih rendah karena peningkatan penerimaan dari pemerintah pusat tidak secara langsung menunjukkan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan, yang memandang pemerintah daerah sebagai *agent* yang memperoleh kewenangan untuk mengelola sumber daya publik dari *principal*. Dalam konteks penelitian ini, Dana Perimbangan merupakan sumber daya yang berasal dari pemerintah pusat dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah melalui sumber pendapatan sendiri masih terbatas. Kondisi tersebut dapat menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi sumber daya daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, peningkatan Dana Perimbangan dalam penelitian ini justru diikuti dengan penurunan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diukur melalui rasio kemandirian.

Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan koefisien regresi positif sebesar 0,110 menunjukkan bahwa semakin besar ukuran daerah, semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, H2 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Riani & Hrp (2022) yang menemukan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan sumber daya yang lebih besar memiliki kapasitas yang lebih luas untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Besarnya sumber daya yang dimiliki juga memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan potensi ekonomi daerah sehingga dapat mendukung kemampuan keuangan daerah.

Dalam perspektif teori keagenan, pemerintah daerah sebagai *agent* memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan oleh *principal*, yaitu masyarakat. Daerah dengan ukuran yang lebih besar memiliki sumber daya dan kapasitas pengelolaan yang lebih besar sehingga pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih luas untuk meningkatkan kemampuan keuangannya. Apabila sumber daya tersebut dikelola secara efektif dan akuntabel, peningkatan ukuran daerah dapat diikuti oleh peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan

pemerintahan melalui sumber pendapatan yang dimiliki. dengan demikian, semakin besar ukuran daerah, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa interaksi antara dana perimbangan dan belanja modal memiliki nilai signifikansi sebesar $0,979 > 0,05$ dengan koefisien regresi negatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa interaksi dana perimbangan dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, belanja modal tidak terbukti memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga H3 ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hajar *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak mampu memoderasi hubungan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tidak signifikannya peran moderasi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belanja modal belum mampu mengubah hubungan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat terjadi karena belanja modal tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya dana perimbangan, tetapi juga oleh kebijakan penganggaran dan kebutuhan pembangunan masing-masing pemerintah daerah.

Dalam perspektif teori keagenan, pemerintah daerah sebagai *agent* dituntut untuk mengelola dana perimbangan dan belanja modal secara efektif serta mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada *principal*. Namun, pengalokasian dana perimbangan ke dalam belanja modal belum tentu secara langsung meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Belanja Modal pada dasarnya lebih berkaitan dengan pengadaan aset tetap dan pembangunan infrastruktur, sedangkan kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio kemandirian yang menekankan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan melalui sumber pendapatan sendiri. Dengan demikian, peningkatan belanja modal belum tentu mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan. Kondisi tersebut menyebabkan belanja modal belum terbukti memperkuat pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa interaksi antara ukuran daerah dan belanja modal memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan koefisien regresi positif sebesar 1,217. Hasil tersebut menunjukkan bahwa interaksi ukuran daerah dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Koefisien interaksi yang positif

menunjukkan bahwa belanja modal memperkuat pengaruh positif ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, H4 diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah akan memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap kinerja keuangan apabila didukung dengan pengalokasian belanja modal. Daerah dengan ukuran yang lebih besar memiliki sumber daya dan aset yang lebih besar untuk dikelola. Ketika sumber daya tersebut dialokasikan melalui belanja modal secara tepat, pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan sarana dan prasarana, kualitas pelayanan publik, serta mendukung aktivitas pembangunan daerah. Dengan demikian, belanja modal dapat memperkuat manfaat dari sumber daya yang dimiliki oleh daerah terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan ini juga dapat dijelaskan melalui teori keagenan, yang menempatkan pemerintah daerah sebagai *agent* yang bertanggung jawab mengelola sumber daya publik untuk memenuhi kepentingan *principal*. Pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar memiliki sumber daya yang lebih banyak sehingga membutuhkan pengelolaan yang semakin efektif dan akuntabel. Pengalokasian sumber daya tersebut melalui Belanja modal dapat menjadi bentuk pengelolaan sumber daya publik yang lebih produktif karena digunakan untuk memperoleh aset tetap serta mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Apabila belanja modal dikelola secara tepat, besarnya sumber daya yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sehingga mendukung peningkatan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, belanja modal terbukti memperkuat pengaruh positif ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan ukuran daerah berpengaruh positif dan signifikan. Belanja modal tidak memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan, tetapi memperkuat pengaruh positif ukuran daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah serta mengoptimalkan efektivitas belanja modal dan pengelolaan sumber daya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan, memperluas cakupan wilayah penelitian, serta mempertimbangkan pengukuran dan faktor lain yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, D., Ariani, W. N., Suropto, S., & Azizah, Z. F. (2024). The impact of leverage, wealth, and audit management on local government performance. *InFestasi*, 20(2), 140–152. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v20i2.27732>

- Ambya. (2023). Ekonomi keuangan daerah. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Dessy Riani, & Junita Putri Rajana Hrp. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, leverage, ukuran pemerintahan, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah pada Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Audit dan Perpajakan Indonesia (JAAPI)*, 3(1), 311–317. <https://doi.org/10.32696/jaapi.v3i1.1282>
- Fariz Isyraqi Aryasandi & Fajar Syaiful Akbar. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(10). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i10.3752>
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26 edisi 10 (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hajar, I., Afrizal, A., Fatimah, F., Wahyu, M., Solihat, I., & Simarmata, J. (2024). Determinan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal sebagai variabel moderating (Studi empiris pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 808. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i1.3926>
- Jensen and Meckling. (1976). In C. Read, *The corporate financiers*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. (1996).
- Khoiriyah, M. Z., & Alliyah, S. (2025). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020–2022. 22. <https://doi.org/https://doi.org/10.31851/jmwe.v23i2>
- Manafe, H. A., Sia Niha, S., & Putu S. Putra, D. (2023). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, leverage dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Suatu kajian studi literatur manajemen keuangan daerah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(3), 541–547. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i3.1322>
- Meidyana, A. (2024). Pemprov Jateng sabet 3 penghargaan APBD Award 2024. *MetroTV News*. <https://www.metrotvnews.com/play/kj2CnRnz-pemprov-jateng-sabet-3-penghargaan-apbd-award-2024>
- Nopia Yudiastuti, L., Sujana, E., & Kadek Sinarwati, N. (2025). Belanja modal memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(1), 51–69. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1.1570>
- Patarai, M. I. (2018). Kinerja keuangan daerah (2nd ed.). De La Macca.
- Putri, S. P., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh PAD, dana perimbangan, dan SILPA terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *JESYA*, 6(2), 2068–2082. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1230>
- Rahmadi, I. A., Aprianti, S., & Wahyudi, R. (2025). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue, dan leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 11(6), 5277–5284. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i6.4883>
- Shapiro, S. P. (2005). Agency theory. *Annual Review of Sociology*, 31(1), 263–284.

<https://doi.org/10.1146/annurev.soc.31.041304.122159>

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2022).

Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2004).